



Wacana Resistensi Netizen Terhadap Kebijakan Pendidikan Dalam Kolom Komentar Tiktok KompasTV: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough

Ach Sholehoddin¹, Dikky Cahyadi², Ria Kasanova³

^{1,2,3} Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Madura

¹achsholehoddin801@gmail.com, ²Dikicahyadi123456@gmail.com, ³kasanovaria@unira.ac.id

Abstrak

Perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap berbagai kebijakan publik, termasuk kebijakan pendidikan. Salah satu ruang diskursus yang banyak dimanfaatkan masyarakat adalah kolom komentar TikTok, yang memungkinkan pengguna mengekspresikan dukungan, kritik, maupun resistensi terhadap isu yang diberitakan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk-bentuk wacana resistensi netizen terhadap kebijakan pendidikan dalam kolom komentar akun TikTok KompasTV berdasarkan perspektif Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Analisis Wacana Kritis. Data berupa komentar netizen pada unggahan TikTok KompasTV yang membahas kebijakan pendidikan selama periode Mei–Juni 2026. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, observasi nonpartisipan, dan teknik catat, sedangkan analisis data menggunakan tiga dimensi Fairclough, yaitu dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi netizen diwujudkan melalui berbagai strategi kebahasaan, seperti kritik, sindiran, ironi, pertanyaan retorik, perbandingan, evaluasi negatif, dan narasi pengalaman personal. Resistensi tersebut terutama diarahkan pada isu kesejahteraan guru, kebijakan guru non-ASN, serta prioritas anggaran pendidikan. Pada dimensi praktik diskursif, kolom komentar TikTok berfungsi sebagai ruang publik digital yang memungkinkan masyarakat membangun, menyebarkan, dan menegosiasikan wacana mengenai kebijakan pendidikan. Pada dimensi praktik sosial, resistensi mencerminkan ketidakpuasan terhadap relasi kekuasaan, pengelolaan kebijakan, dan distribusi sumber daya pendidikan. Di samping itu, ditemukan pula komentar yang mendukung program pemerintah, sehingga menunjukkan adanya keberagaman posisi ideologis masyarakat dalam merespons kebijakan pendidikan di ruang digital.

Kata Kunci: Wacana Resistensi, Kebijakan Pendidikan, Kolom Komentar Tiktok Kompastv, Analisis Wacana Kritis Fairclough.

Abstract

The development of social media has changed the pattern of public communication in conveying aspirations and criticisms of various public policies, including education policies. One of the discourse spaces that is widely used by the public is the TikTok comment column, which allows users to express support, criticism, and resistance to the issues being reported. This study aims to describe the forms of discourse of netizens' resistance to education policies in the comment column of the KompasTV TikTok account based on the perspective of Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis. The research uses a qualitative approach with the type of research Critical Discourse Analysis. Data in the form of netizens' comments on KompasTV's TikTok uploads that discuss education policies during the May-June 2026 period. Data collection was carried out through documentation techniques, non-participant observation, and note-taking techniques, while data analysis used Fairclough's three dimensions, namely the text dimension, discursive practice, and social practice. The results of the study show that netizens' resistance is manifested through various linguistic strategies, such as criticism, sarcasm, irony, rhetorical questions, comparisons, negative evaluations, and narratives of personal experiences. The resistance is mainly directed at the issue of teacher welfare, non-ASN teacher policies, and education budget priorities. In the dimension of discursive practices, TikTok's comment column functions as a digital public space that allows people to build, disseminate, and negotiate discourses on education policies. In the dimension of social practice, resistance reflects dissatisfaction with power relations, policy management, and distribution of educational resources. In addition, comments were also found that supported government programs, thus showing the diversity of ideological positions of the community in responding to education policies in the digital space.

Keywords: Resistance Discourse, Education Policy, Kompastv Tiktok Comment Column, Fairclough Critical Discourse Analysis.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi, memperoleh informasi, dan menyampaikan pendapat. Transformasi digital yang berlangsung secara masif telah melahirkan berbagai platform media sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat mendiskusikan berbagai isu sosial, politik,

ekonomi, dan pendidikan. Kehadiran media sosial memungkinkan setiap individu berperan sebagai produsen sekaligus konsumen informasi sehingga menciptakan pola komunikasi yang lebih partisipatif dibandingkan media konvensional. Melalui media sosial, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, maupun dukungan terhadap berbagai kebijakan pemerintah secara langsung dan terbuka, serta terlibat dalam proses pertukaran informasi dan pembentukan wacana di ruang digital (Alagoz, 2022; Daly et al., 2019; Rashid, 2026; Sari et al., 2025).

Salah satu platform media sosial yang mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir adalah TikTok. Pada awal kemunculannya, TikTok dikenal sebagai aplikasi hiburan berbasis video pendek, namun saat ini platform tersebut telah berkembang menjadi media penyebaran informasi, edukasi, kampanye sosial, hingga pemberitaan aktual. Tingginya jumlah pengguna TikTok menjadikan platform ini sebagai salah satu media digital yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini publik. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa TikTok tidak hanya berfungsi sebagai sarana konsumsi informasi, tetapi juga sebagai arena diskusi publik yang dinamis, tempat berbagai isu nasional menjadi perbincangan dalam unggahan video maupun kolom komentar. Pengguna dapat memberikan interpretasi, tanggapan, dan evaluasi terhadap isu yang dibahas sehingga terjadi pertukaran gagasan dan negosiasi makna antarpengguna dalam ruang digital (Aharazi, 2024; Pei et al., 2025; Xu et al., 2025)

Salah satu fitur yang memiliki peran penting dalam pembentukan diskusi publik di TikTok adalah kolom komentar. Fitur ini memungkinkan pengguna mengekspresikan pandangan mereka secara langsung terhadap informasi yang disampaikan. Melalui komentar-komentar tersebut dapat ditemukan berbagai bentuk dukungan, kritik, sindiran, penolakan, hingga perlawanan terhadap kebijakan atau tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Sejalan dengan penelitian Firdaus et al. (2023) menunjukkan bahwa TikTok dimanfaatkan masyarakat sebagai media untuk menyampaikan kritik terhadap berbagai persoalan pembangunan dan kebijakan publik. Temuan tersebut diperkuat oleh Novita & Setiawan (2023) yang menemukan bahwa kolom komentar TikTok menjadi ruang interaksi yang memperlihatkan beragam ekspresi bahasa pengguna dalam merespons suatu isu, termasuk kritik dan penolakan terhadap pihak tertentu.

Dalam ranah kebijakan publik, sektor pendidikan merupakan salah satu bidang yang senantiasa memperoleh perhatian masyarakat. Pendidikan memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan pembangunan sumber daya manusia dan masa depan bangsa. Setiap kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah berpotensi memengaruhi peserta didik, guru, orang tua, dan institusi pendidikan. Dalam penelitian Hutagaol et al. (2022), pendidikan dipandang sebagai aspek penting dalam pembangunan nasional yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia dan nilai-nilai sosial. Sementara itu, Arhas & Wahira (2025) mengkaji berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan tenaga pendidik dan lembaga pendidikan yang berdampak pada penyelenggaraan pendidikan.

Berbagai kebijakan pendidikan yang diterapkan pemerintah sering memunculkan respons yang beragam dari masyarakat. Sebagian masyarakat memberikan dukungan karena menilai kebijakan tersebut mampu meningkatkan kualitas pendidikan, sementara sebagian lainnya menyampaikan kritik dan penolakan karena menganggap kebijakan tersebut belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau bahkan berpotensi menimbulkan persoalan baru. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan menjadi isu yang menarik perhatian publik dan memunculkan berbagai tanggapan di ruang digital (Eisenegger & Schäfer, 2023; Schlesinger, 2020). Pada era digital, respons tersebut tidak lagi disampaikan melalui forum formal semata, melainkan juga melalui media sosial yang dimanfaatkan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, mengkritik kebijakan, serta membangun solidaritas dengan kelompok yang memiliki pandangan serupa terhadap berbagai isu pendidikan (Mattila & Nummi, 2022; Mulyati & Maharudin, 2025; Saeni et al., 2025)

Salah satu bentuk respons yang sering muncul di media sosial adalah resistensi, yaitu bentuk perlawanan terhadap praktik kekuasaan yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat. Dalam ruang digital, resistensi dapat diekspresikan melalui kritik, sindiran, satire, protes, maupun tuntutan perubahan yang disampaikan melalui bahasa dan simbol-simbol tertentu. Parthama et al. (2025) menjelaskan bahwa media sosial telah menjadi ruang penting bagi masyarakat untuk membangun resistensi terhadap berbagai kebijakan pemerintah melalui pembentukan opini dan wacana tandingan. Sejalan dengan itu, Yasir et al. (2022) menunjukkan bahwa praktik resistensi politik di media sosial sering diwujudkan melalui penggunaan bahasa figuratif, seperti metafora, ironi, dan bentuk ekspresi simbolik lainnya. Kajian mengenai praktik sosial dan komunitas resistensi juga memperlihatkan bahwa bahasa menjadi salah satu sarana yang digunakan kelompok masyarakat dalam mengekspresikan penolakan dan memperjuangkan kepentingan tertentu dalam ruang publik digital (*Social Practices and Communities of Resistance*, 2025).

Fenomena resistensi netizen terhadap kebijakan pendidikan dapat ditemukan pada berbagai akun media sosial yang menyajikan informasi mengenai pendidikan. Salah satu akun yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran informasi publik adalah akun TikTok KompasTV. Sebagai media berita nasional, KompasTV secara rutin mengunggah berbagai informasi terkait kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan di bidang pendidikan. Unggahan tersebut sering memunculkan ribuan komentar yang mencerminkan respons masyarakat terhadap isu yang dibahas.

Komentar-komentar netizen pada akun TikTok KompasTV tidak hanya berisi tanggapan sederhana, tetapi juga mengandung berbagai wacana yang merepresentasikan sikap, ideologi, dan kepentingan tertentu. Dalam komentar tersebut dapat ditemukan berbagai bentuk resistensi yang menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pendidikan. Kondisi tersebut menjadikan kolom komentar TikTok KompasTV sebagai sumber data yang relevan untuk mengkaji bagaimana resistensi publik dikonstruksi dan diekspresikan melalui

Untuk memahami fenomena tersebut secara mendalam, diperlukan pendekatan yang mampu mengungkap hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi. Salah satu pendekatan yang relevan adalah Analisis Wacana Kritis (AWK) yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Fairclough (2013) memandang bahasa sebagai praktik sosial yang tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakanginya. Melalui pendekatan ini, wacana dianalisis melalui tiga dimensi, yaitu teks (*text*), praktik diskursif (*discursive practice*), dan praktik sosial (*social practice*), untuk memahami bagaimana relasi kekuasaan dan ideologi direpresentasikan dalam masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang penting bagi masyarakat untuk mengekspresikan kritik dan resistensi terhadap berbagai kebijakan publik. Penelitian Priyantomo (2025) menemukan adanya dukungan, kritik, dan resistensi masyarakat terhadap kebijakan Makan Bergizi Gratis yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi. Taliu & Sukmono (2025) menunjukkan bahwa TikTok berfungsi sebagai arena produksi dan reproduksi wacana kritik masyarakat terhadap kondisi sosial dan kebijakan publik. Arzani Ardebili (2025) mengungkap bahwa media sosial berperan sebagai ruang publik digital yang memfasilitasi munculnya gerakan resistensi dan kritik terhadap kekuasaan. Istiqomah et al. (2025) menemukan strategi resistensi pengguna media sosial yang diwujudkan melalui kritik, sindiran, dan penolakan terhadap dominasi wacana tertentu. Sementara itu, Yampap (2025) menunjukkan adanya keterkaitan antara praktik diskursif, ideologi, dan relasi kekuasaan dalam konstruksi isu pendidikan di media digital.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, kajian mengenai resistensi di media sosial telah dilakukan dalam berbagai konteks dan objek penelitian. Namun, penelitian yang secara khusus membahas wacana resistensi netizen terhadap kebijakan pendidikan dalam kolom komentar TikTok KompasTV masih terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada kebijakan publik secara umum, gerakan sosial, identitas digital, maupun platform media sosial dengan konteks yang berbeda. Selain itu, kajian yang menghubungkan resistensi netizen, kebijakan pendidikan, dan relasi kekuasaan dalam ruang komentar media digital masih belum banyak dilakukan. Kesenjangan tersebut menjadi dasar penelitian ini untuk mengkaji konstruksi wacana resistensi netizen terhadap kebijakan pendidikan dalam kolom komentar TikTok KompasTV melalui dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosial dalam Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Analisis Wacana Kritis (AWK). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami dan menginterpretasikan fenomena sosial yang direpresentasikan melalui bahasa dalam kolom komentar media sosial secara mendalam dan kontekstual. Penelitian kualitatif berupaya mengeksplorasi serta memahami makna yang dibangun oleh individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2009).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Fairclough (2013) memandang bahasa sebagai praktik sosial yang tidak dapat dipisahkan dari relasi kekuasaan, ideologi, dan konteks sosial yang melatarbelakanginya. Analisis Wacana Kritis digunakan untuk mengungkap bagaimana suatu wacana diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi serta bagaimana wacana tersebut merepresentasikan kepentingan dan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Pendekatan ini dipandang relevan untuk mengkaji wacana resistensi netizen terhadap kebijakan pendidikan dalam kolom komentar TikTok KompasTV.

Sumber data penelitian ini berupa komentar netizen pada unggahan akun TikTok KompasTV yang memuat informasi mengenai kebijakan pendidikan. Komentar-komentar tersebut dipilih karena mengandung berbagai bentuk respons masyarakat, seperti kritik, penolakan, sindiran, protes, dan bentuk resistensi lainnya terhadap kebijakan pendidikan yang diberitakan.

Data penelitian berupa satuan lingual yang mengandung wacana resistensi terhadap kebijakan pendidikan, meliputi kata, frasa, klausa, kalimat, maupun komentar utuh yang menunjukkan ketidaksetujuan, kritik, penolakan, sindiran, atau tuntutan perubahan terhadap kebijakan pendidikan yang dibahas dalam unggahan TikTok KompasTV. Pemilihan data dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan kesesuaian komentar terhadap fokus penelitian. Kriteria data yang dipilih meliputi: (1) komentar yang secara eksplisit maupun implisit memuat bentuk resistensi terhadap kebijakan pendidikan; (2) komentar yang mengandung argumentasi, kritik, penolakan, sindiran, atau tuntutan terhadap pihak yang berwenang; (3) komentar yang memperoleh respons atau interaksi dari pengguna lain sehingga menunjukkan adanya proses diskursif; serta (4) komentar yang memiliki unsur kebahasaan yang dapat dianalisis berdasarkan dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosial dalam model Analisis Wacana Kritis Fairclough. Komentar yang bersifat spam, promosi, tidak relevan dengan isu pendidikan, atau hanya berupa simbol dan emoji tanpa makna linguistik yang jelas tidak dijadikan data penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi nonpartisipan, dan teknik catat. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan unggahan akun TikTok KompasTV yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan. Observasi nonpartisipan dilakukan dengan mengamati komentar netizen tanpa terlibat dalam interaksi yang berlangsung pada platform tersebut. Selanjutnya, teknik catat dilakukan dengan mencatat dan mengelompokkan komentar yang mengandung unsur resistensi sesuai dengan fokus penelitian (Creswell, 2009). Analisis data dilakukan menggunakan model Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough yang meliputi tiga dimensi, yaitu teks (*text*), praktik diskursif (*discursive practice*), dan praktik sosial (*social practice*) (Fairclough, 2013). Pada dimensi teks, analisis difokuskan pada unsur-unsur kebahasaan yang digunakan netizen dalam membangun resistensi, seperti pilihan kosakata, metafora, ironi, sindiran, dan struktur kalimat. Pada dimensi praktik diskursif, analisis diarahkan pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi komentar dalam kolom komentar TikTok KompasTV. Adapun pada dimensi praktik sosial, analisis dilakukan untuk mengungkap kondisi sosial, ideologi, dan relasi kekuasaan yang melatarbelakangi munculnya resistensi netizen terhadap kebijakan pendidikan.

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi teori. Triangulasi teori digunakan dengan membandingkan dan menafsirkan data berdasarkan berbagai konsep yang relevan, seperti teori resistensi, ruang publik digital, media sosial, serta Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Penerapan triangulasi teori memungkinkan data yang sama dikaji dari lebih dari satu perspektif teoretis sehingga dapat memperkaya proses interpretasi dan membantu peneliti memahami makna yang terkandung dalam wacana resistensi netizen terhadap kebijakan pendidikan secara lebih mendalam (Creswell, 2009).

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menganalisis wacana resistensi netizen terhadap kebijakan pendidikan yang muncul dalam kolom komentar akun TikTok KompasTV selama periode Mei–Juni 2026. Data penelitian diperoleh dari beberapa unggahan KompasTV yang membahas isu pendidikan, antara lain kesejahteraan guru, kenaikan gaji guru, kebijakan guru non-ASN, Sekolah Rakyat, serta pernyataan Presiden Prabowo mengenai pendidikan. Berdasarkan analisis menggunakan model Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough yang meliputi dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosial, ditemukan bahwa sebagian besar komentar netizen merepresentasikan bentuk resistensi terhadap kebijakan pendidikan pemerintah melalui kritik, sindiran, pertanyaan retorik, ironi, dan tuntutan perubahan kebijakan.

Tabel 1. Analisis Wacana Resistensi Netizen terhadap Kebijakan Pendidikan dalam Kolom Komentar TikTok KompasTV

No	Kutipan Komentar	Dimensi Teks	Praktik Diskursif	Praktik Sosial
1	"klo perlu gaji guru 15 juta gaji anggota dewan cukup 5 juta aja"	Penggunaan perbandingan antara gaji guru dan anggota dewan merepresentasikan kritik terhadap ketimpangan kesejahteraan yang dianggap tidak berpihak kepada tenaga pendidik.	Ungkapan tersebut muncul sebagai respons atas pemberitaan mengenai kesejahteraan guru dengan membandingkan profesi guru dan pejabat negara.	Mencerminkan tuntutan masyarakat terhadap keadilan sosial dalam distribusi kesejahteraan tenaga pendidik.
2	"jadi fungsi kau jadi presiden apa?"	Kalimat interogatif digunakan sebagai pertanyaan retorik yang mengandung kritik terhadap kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pendidikan.	Pernyataan tersebut diproduksi sebagai respons terhadap penjelasan pemerintah mengenai keterbatasan anggaran pendidikan.	Menunjukkan menurunnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap efektivitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan pendidikan.
3	"tp utk MBG dan bangun KOPDES ada ya pak???"	Kalimat tanya digunakan sebagai bentuk sindiran terhadap prioritas anggaran pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada pendidikan.	Respons tersebut dibangun melalui perbandingan antara program pendidikan dan program pemerintah lainnya.	Menggambarkan persepsi masyarakat mengenai ketimpangan prioritas pembangunan nasional.
4	"Tutup MBG nya... naikkan gaji guru dan dosen"	Kalimat imperatif digunakan untuk menegaskan tuntutan perubahan kebijakan anggaran negara.	Pernyataan tersebut lahir dari ketidakpuasan terhadap alokasi anggaran yang dianggap kurang mengutamakan pendidikan.	Menunjukkan aspirasi masyarakat agar kesejahteraan guru menjadi prioritas pemerintah.
5	"klo tdk blh mengajar trs solusinya gmn?"	Kalimat tanya menunjukkan keraguan dan kekhawatiran terhadap implementasi kebijakan guru non-ASN.	Pertanyaan tersebut muncul setelah beredarnya informasi mengenai larangan guru non-ASN mengajar pada tahun 2027.	Merepresentasikan kecemasan masyarakat terhadap keberlangsungan layanan pendidikan.
6	"angkat saja jadi ASN semua"	Pilihan kata "angkat" menunjukkan tuntutan langsung kepada pemerintah untuk memberikan kepastian status guru honorer.	Pernyataan tersebut diproduksi sebagai alternatif solusi atas kebijakan guru non-ASN.	Menggambarkan harapan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan dan status guru.
7	"yang mau ngajar siapa? apakah DPR yg mau ngajar?"	Pertanyaan retorik dan sindiran digunakan untuk mempertanyakan efektivitas kebijakan yang dibuat pemerintah.	Respons tersebut muncul karena adanya kekhawatiran terhadap kekurangan tenaga pendidik di sekolah.	Menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dinilai

				tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan.
8	"yang penting MBG lancar, krn guru tdk ada dalam program pemerintah"	Penggunaan ironi merepresentasikan kritik terhadap perhatian pemerintah yang dianggap lebih besar pada program lain dibanding pendidikan.	Pernyataan tersebut dibangun melalui perbandingan antara program MBG dan kesejahteraan guru.	Mencerminkan pandangan bahwa pendidikan belum menjadi prioritas utama negara.
9	"kekurangan guru tapi tiap tahun lulusan keguruan banyak"	Kontradiksi dalam kalimat digunakan untuk menunjukkan ketidaksesuaian antara kebutuhan dan kebijakan pendidikan.	Ungkapan tersebut diproduksi berdasarkan realitas banyaknya lulusan pendidikan yang belum terserap.	Menunjukkan adanya persoalan struktural dalam manajemen tenaga pendidik nasional.
10	"Sebegitu pentingkah petugas MBG dibandingkan tenaga pendidik?"	Pertanyaan retoris digunakan untuk membandingkan posisi guru dengan petugas program pemerintah.	Pernyataan tersebut muncul sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada guru.	Menggambarkan konflik kepentingan dalam penentuan prioritas kebijakan publik.
11	"kacau pendidikan kita... sedih"	Diksi evaluatif menunjukkan penilaian negatif terhadap kondisi pendidikan nasional.	Ungkapan tersebut diproduksi sebagai respons emosional terhadap berbagai persoalan pendidikan.	Mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap masa depan pendidikan Indonesia.
12	"mana sila ke 5 Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"	Rujukan terhadap Pancasila digunakan sebagai legitimasi moral dalam menyampaikan kritik.	Pernyataan tersebut dibangun dengan menghubungkan kebijakan pendidikan dan nilai dasar negara.	Menunjukkan tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya keadilan sosial dalam sektor pendidikan.
13	"saya saja karena kekurangan guru harus mengajar 2 mapel"	Pengalaman pribadi digunakan sebagai strategi untuk memperkuat kritik terhadap kebijakan pendidikan.	Ungkapan tersebut muncul dari pengalaman langsung pelaku pendidikan di lapangan.	Menggambarkan krisis tenaga pendidik yang masih terjadi di berbagai sekolah.
14	"istri saya sebagai guru SD diminta mengajar 2 kelas"	Narasi personal digunakan untuk menunjukkan beratnya beban kerja guru akibat kekurangan tenaga pendidik.	Pernyataan tersebut diproduksi berdasarkan pengalaman keluarga yang terlibat langsung dalam dunia pendidikan.	Menunjukkan dampak nyata kebijakan terhadap kondisi kerja guru.
15	"tidak adil banget"	Diksi evaluatif digunakan untuk mengekspresikan penolakan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan guru.	Ungkapan tersebut muncul sebagai respons spontan terhadap isu pendidikan yang berkembang.	Merepresentasikan persepsi masyarakat mengenai ketidakadilan kebijakan pendidikan.
16	"guru honorer digaji 300 ribu setelah mengabdikan 5 tahun"	Penyebutan nominal gaji digunakan untuk menegaskan rendahnya kesejahteraan guru honorer.	Pernyataan tersebut diproduksi sebagai kritik terhadap perlakuan negara terhadap guru honorer.	Menunjukkan ketimpangan kesejahteraan dalam sektor pendidikan.
17	"SE Mendikdasmen itu yang ambigu"	Kata "ambigu" digunakan untuk menggambarkan ketidakjelasan regulasi pendidikan yang diterbitkan pemerintah.	Ungkapan tersebut muncul sebagai respons terhadap polemik surat edaran guru non-ASN.	Mencerminkan rendahnya kepercayaan publik terhadap kejelasan kebijakan pendidikan.
18	"pendidikan itu bukan prioritas buat pemerintah"	Kalimat deklaratif digunakan untuk membangun narasi bahwa pemerintah kurang memberi perhatian terhadap pendidikan.	Pernyataan tersebut lahir dari akumulasi berbagai kebijakan yang dianggap merugikan guru.	Menunjukkan adanya persepsi negatif masyarakat terhadap arah pembangunan pendidikan nasional.
19	"krisis guru karena ga ada yang mau lagi jadi guru"	Hubungan sebab-akibat digunakan untuk menjelaskan persoalan rendahnya minat menjadi guru.	Ungkapan tersebut dibangun berdasarkan kondisi kesejahteraan guru yang dianggap belum memadai.	Menggambarkan persoalan regenerasi profesi guru di Indonesia.
20	"jahat bgt sama guru honorer"	Pilihan kata "jahat" digunakan untuk memberikan penilaian moral terhadap kebijakan pemerintah.	Pernyataan tersebut muncul sebagai bentuk empati terhadap kondisi guru honorer.	Menunjukkan adanya konflik antara harapan masyarakat dan kebijakan pemerintah.
21	"honor bertahun malah dikorbankan"	Kata "dikorbankan" memosisikan guru honorer sebagai pihak yang dirugikan oleh kebijakan.	Ungkapan tersebut diproduksi sebagai bentuk pembelaan terhadap guru honorer.	Mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap perlindungan negara bagi tenaga pendidik.
22	"semoga bkn ladang korup lg nanti"	Pilihan kata "ladang korupsi" menunjukkan kecurigaan terhadap pengelolaan program pendidikan.	Pernyataan tersebut muncul dalam respons terhadap program Sekolah Rakyat.	Menunjukkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola kebijakan publik.
23	"Saya sangat mengapresiasi inisiatif Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo"	Diksi apresiatif digunakan untuk membangun citra positif terhadap program pendidikan pemerintah.	Ungkapan tersebut diproduksi sebagai bentuk dukungan terhadap program Sekolah Rakyat.	Menunjukkan adanya legitimasi sosial terhadap kebijakan pendidikan pemerintah.
24	"Presiden Prabowo LANJUT 2 PERIODE"	Ungkapan dukungan politik digunakan untuk menunjukkan penerimaan terhadap kebijakan pemerintah.	Pernyataan tersebut muncul sebagai respons positif terhadap pidato Presiden mengenai pendidikan.	Merepresentasikan kepercayaan sebagian masyarakat terhadap kepemimpinan pemerintah.
25	"presidenku tlg lah bangsa ini"	Kalimat harapan digunakan untuk menunjukkan dukungan dan	Ungkapan tersebut diproduksi sebagai bentuk ekspektasi	Menunjukkan keyakinan bahwa pendidikan dapat

Berdasarkan hasil analisis, resistensi netizen dalam kolom komentar TikTok KompasTV cenderung muncul pada isu kesejahteraan guru, kebijakan guru non-ASN, serta prioritas anggaran pendidikan. Resistensi tersebut diekspresikan melalui berbagai strategi kebahasaan seperti pertanyaan retorik, sindiran, ironi, perbandingan, dan evaluasi negatif terhadap kebijakan pemerintah. Penggunaan bentuk-bentuk bahasa tersebut menunjukkan bahwa netizen tidak sekadar memberikan tanggapan terhadap informasi yang diterima, melainkan juga membangun posisi kritis terhadap kebijakan pendidikan yang dianggap belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya guru dan tenaga pendidik.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kolom komentar TikTok telah berkembang menjadi ruang publik digital yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik secara terbuka terhadap kebijakan pemerintah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Saeni et al. (2025) yang menjelaskan bahwa media sosial berfungsi sebagai ruang komunikasi publik tempat masyarakat mengekspresikan kritik, membangun opini, dan merespons kebijakan pemerintah secara langsung. Dalam konteks penelitian ini, kolom komentar TikTok KompasTV menjadi arena bagi netizen untuk menyampaikan aspirasi, ketidakpuasan, dan tuntutan terhadap kebijakan pendidikan yang sedang berlangsung.

Dominasi komentar yang mempertanyakan kesejahteraan guru dan kebijakan pendidikan menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk membangun wacana resistensi terhadap relasi kekuasaan yang bekerja melalui kebijakan negara. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Arzani Ardebili (2025) yang menyatakan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang pembentukan resistensi digital yang memungkinkan masyarakat melakukan perlawanan simbolik terhadap keputusan dan praktik kekuasaan. Dalam penelitian ini, resistensi tampak ketika netizen mempertanyakan prioritas anggaran pemerintah, membandingkan kesejahteraan guru dengan kelompok profesi lain, serta mengkritik kebijakan yang dianggap merugikan tenaga pendidik.

Keberadaan komentar-komentar kritis juga memperlihatkan bahwa media baru telah mengubah pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Jika sebelumnya kritik terhadap kebijakan lebih banyak disampaikan melalui forum formal, kini media sosial memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat secara langsung kepada ruang publik yang lebih luas. Kondisi ini sejalan dengan temuan Barnes (2024) yang menjelaskan bahwa media baru, termasuk TikTok, telah menciptakan ruang diskusi publik yang memungkinkan masyarakat mendebat, mengevaluasi, dan mengkritisi berbagai bentuk kekuasaan. Dengan demikian, interaksi yang terjadi dalam kolom komentar TikTok tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas komunikasi biasa, tetapi juga menjadi praktik sosial yang mencerminkan hubungan antara warga negara dan pemerintah.

Lebih lanjut, tingginya partisipasi netizen dalam merespons isu pendidikan menunjukkan berkembangnya praktik demokrasi digital dalam masyarakat. Papacharissi (2026) menjelaskan bahwa media digital memungkinkan warga negara terlibat secara aktif dalam proses demokrasi melalui partisipasi, diskusi, dan penyampaian kritik terhadap kebijakan publik. Dalam penelitian ini, partisipasi tersebut terlihat dari banyaknya komentar yang berisi evaluasi terhadap kebijakan pendidikan, usulan alternatif kebijakan, serta tuntutan agar pemerintah lebih memprioritaskan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan nasional.

Selain menghadirkan resistensi, ruang komentar TikTok juga memperlihatkan adanya dukungan terhadap beberapa program pendidikan pemerintah, khususnya Sekolah Rakyat. Kehadiran komentar yang mendukung dan menolak menunjukkan bahwa ruang digital merupakan arena kontestasi wacana tempat berbagai kelompok masyarakat berusaha mempertahankan pandangan, kepentingan, dan ideologinya masing-masing. Temuan ini sejalan dengan pandangan Zulkarnain (2025) yang menyatakan bahwa media sosial telah mengubah komunikasi politik menjadi lebih partisipatif karena memungkinkan masyarakat terlibat langsung dalam proses pengawasan, evaluasi, dan pembentukan opini terhadap kebijakan pemerintah. Dinamika komentar yang muncul menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi arena diskursif yang mempertemukan berbagai kepentingan, ideologi, dan perspektif masyarakat terhadap kebijakan pendidikan. Dalam arena tersebut, wacana mengenai kesejahteraan guru, prioritas anggaran, dan pengelolaan pendidikan diproduksi, disebarluaskan, serta dinegosiasikan secara terus-menerus oleh para pengguna media sosial melalui praktik komunikasi digital.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, wacana resistensi netizen terhadap kebijakan pendidikan dalam kolom komentar TikTok KompasTV diwujudkan melalui berbagai bentuk ekspresi kebahasaan, seperti kritik, sindiran, pertanyaan retorik, evaluasi negatif, perbandingan, serta penyampaian pengalaman personal. Bentuk-bentuk resistensi tersebut banyak muncul pada isu kesejahteraan guru, kebijakan guru non-ASN, dan prioritas anggaran pendidikan. Pada dimensi teks, netizen menggunakan bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan ketidaksetujuan terhadap kebijakan yang dianggap kurang berpihak pada dunia pendidikan. Pada dimensi praktik diskursif, kolom komentar TikTok berfungsi sebagai ruang publik digital yang memungkinkan masyarakat merespons, menafsirkan, dan

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.11069>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

menyebarkan wacana mengenai kebijakan pendidikan secara terbuka. Sementara itu, pada dimensi praktik sosial, resistensi yang muncul merefleksikan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kesejahteraan guru, ketidakjelasan regulasi pendidikan, serta pengelolaan prioritas anggaran pemerintah. Di sisi lain, ditemukan pula sejumlah komentar yang mendukung program pendidikan pemerintah, terutama Sekolah Rakyat, sehingga menunjukkan adanya keberagaman posisi dan pandangan masyarakat terhadap kebijakan pendidikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa media sosial memiliki peran penting sebagai ruang artikulasi aspirasi publik sekaligus sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji wacana kebijakan pendidikan pada platform media sosial lain atau membandingkan respons publik terhadap berbagai kebijakan pendidikan dalam periode yang berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai dinamika diskursus pendidikan di ruang digital.

Reference

- Aharazi, B. K. (2024). *Contextualizing Tiktok Controversies: Critical Discourse Analysis Of Platform Privacy Debates*. University Of Central Florida.
- Alagoz, A. V. (2022). Internet Communications As A Resource Of Interaction Between Government And Society. *Chronos (Tripoli)*, 7(4(66)), 33–34. <https://doi.org/10.52013/2658-7556-66-4-9>
- Arhas, S. H., & Wahira, W. (2025). Literature Review: Government Policies On The Development Of Teaching Personnel And Educational Institutions. *Journal Of Public Policy And Local Government*, 37–45. <https://doi.org/10.70188/P355t147>
- Arzani Ardebili, S. (2025). *Tweets Of Resistance: Social Media And Mobilization In Contemporary Kenya*. Lund University.
- Barnes, A. (2024). *An Open Conversation: Deliberating Perceptions Of Power Through New Media* [University Of Southern Mississippi]. <https://aquila.usm.edu/dissertations/2223/>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. Sage.
- Daly, A. J., Supovitz, J. A., & Del Fresno, M. (2019). The Social Side Of Educational Policy: How Social Media Is Changing The Politics Of Education. *Teachers College Record*, 121(14), 1–26. <https://doi.org/10.1177/016146811912101402>
- Eisenegger, M., & Schäfer, M. S. (2023). Reconceptualizing Public Sphere(S) In The Digital Age? On The Role And Future Of Public Sphere Theory. *Communication Theory*, 33(2–3). <https://academic.oup.com/Ct/Article/33/2-3/61/7205472>
- Fairclough, N. (2013). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study Of Language*. Routledge.
- Firdaus, S., Naila, N., Pramesti, A. D., Sari, C. K., Azzahra, D. F., & Angela, D. (2023). *Tiktok Sebagai Media Sosial Dalam Melakukan Kritik Terhadap Pembangunan Di Lampung*. <https://doi.org/10.47134/Jsd.V1i2.1882>
- Hutagaol, A. L., Syukri, M., Siahaan, A., & Wardah, S. R. R. (2022). An Analysis Of National Education System Policy And Social Values. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(5), 6497–6504. <https://doi.org/10.31004/Edukatif.V4i5.3731>
- Istiqomah, I., Sastia, M., & Salsabila, E. (2025). The Language Of Shame In Cyber Discourse: A Critical Discourse Analysis Of Gendered Moral Policing On X Media. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*.
- Mattila, H., & Nummi, P. (2022). The Challenge Of The Digital Public Sphere: Finnish Experiences Of The Role Of Social Media In Participatory Planning. *Planning Theory & Practice*. <https://doi.org/10.1080/14649357.2022.2074527>
- Muliyati, M., & Maharudin, D. (2025). *Social Media Provocation And Public Opinion Shifts In Government Policy Evaluation: A PRISMA Systematic Review*. <https://journal.lifescifi.com/index.php/RH/Article/View/843>
- Novita, R., & Setiawan, T. (2023). *Forensic Linguistic Analysis Of Netizens' Hate Speech Acts In Tik-Tok Comment Section*. <https://doi.org/10.33258/Biolae.V5i2.894>
- Papacharissi, Z. (2026). *The Routledge Companion To Digital Media And Democracy*. Routledge.
- Parthama, I. G. N., Pastika, I. W., Netra, I. M., & Aryawibawa, I. N. (2025). From Public Opinion To Digital Resistance: The Role Of Social Media In Contesting Government Policies. *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences*, 4(6). <https://doi.org/10.55227/Ijhess.V4i6.1617>
- Pei, J., Cheng, L., & Zhu, W. (2025). Influencer Discourse As A Dynamic Continuum: A Corpus-Assisted Discourse Study Of Representing Influencers In Chinese And US Newspapers. *Journalism*.
- Priyantomo, B. A. (2025). *Critical Discourse Analysis Of The Free Nutritious Meal Policy: A Study Of Discourse On Social Media X BT - International Conference On Multidisciplinary Studies And Innovation*.
- Rashid, R. A. (2026). Digital Discourse Studies: Analysing Communication In Platformed And Algorithmic Publics. *Journal Of Multicultural Discourses*. <https://doi.org/10.1080/17447143.2026.2671938>
- Saeni, E., Cindrakasih, R. R. R., & Azis, A. (2025). Power And Criticism: The Dynamics Of Digital Communication In Online Public Spaces. *Akrab Juara*. <https://akrabjuara.com/index.php/Akrabjuara/Article/View/2604>
- Sari, E. D. P., Hamadi, H. H., & Setiyadi, D. B. P. (2025). Critical Discourse Analysis In Digital Media: Unveiling Ideology And Power In The Technological Era. *Journal Of The American Studies*. <https://americanjournal.us/american/article/view/22>
- Schlesinger, P. (2020). After The Post-Public Sphere. *Media, Culture & Society*, 42(7–8). <https://doi.org/10.1177/0163443720948003>
- Social Practices And Communities Of Resistance (Pp. 122–142). (2025). <https://doi.org/10.2307/Jj.12348227.11>
- Taliu, S. A. A. P., & Sukmono, F. G. (2025). Discourse Production Of #Kaburajadulu On Tiktok: A Critical Discourse Analysis Of Awbimax Content. *Jurnal Komunikasi Dan Bisnis*.
- Xu, Y., Karppinen, K. E., & Pantti, M. K. (2025). Platform Values And Strategic Positioning: An Analysis Of Tiktok's Community Guidelines And Public Communications In 2018–2024. *Observatorio (OBS*)*.
- Yampap, U. (2025). Reconstructing Teacher Identity In The Digital Age: A Critical Discourse Study Of Influencer Practices In Madrasahs. *Molang: Journal Islamic Education*, 4(2).
- Yasir, H. K. M., Khan, A. A., & Khalid, A. A. (2022). Political Resistance On Social Media: An Evaluation Of Figurative Language. *Global Political Review*, VII(II), 23–30. [https://doi.org/10.31703/Gpr.2022\(Vii-li\).04](https://doi.org/10.31703/Gpr.2022(Vii-li).04)
- Zulkarnain, I. (2025). *Political Communication In The Digital Era: Concepts, Contexts, And Challenges*. Book.